



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Badan Kepegawaian Negara

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2020-2024. Perumusan renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah pembangunan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian agar seluruh program dan kegiatan terlaksana secara lebih terstruktur, terukur, dan tepat sasaran. Dalam perumusan renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan eksternal dan kebijakan yang ada. Oleh sebab itu, renstra tahun 2020-2024 direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan kebijakan internal maupun eksternal Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Akhir kata, reviu renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan kurun waktu 5 (lima) tahun, dan semoga reviu renstra ini bermanfaat dalam mendukung visi BKN ke depan.

Jakarta, 10 Desember 2022
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
1.4. Landasan Hukum.....	2
BAB. II. VISI MISI DAN TUJUAN	3
2.1. Visi	3
2.2. Misi	3
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.4. Indikator Kinerja Utama.....	7
2.5. Program dan Kegiatan	11
BAB. III. PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian merupakan turunan dari rencana strategis Badan Kepegawaian Negara. Lebih jauh lagi, renstra BKN tahun 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Visi BKN adalah ***mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong***. Unit kerja eselon I di lingkungan BKN termasuk Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian perlu mendasari visinya pada visi tersebut untuk mencapai tujuan bersama seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada BKN. Renstra Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan arah kebijakan dan program perlu mendapat perhatian, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terutama terkait keselarasan dengan tujuan BKN dan dinamika organisasi.

Metode yang digunakan dalam rewiu ini adalah dengan membandingkan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, hingga target kinerja dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, hingga target kinerja BKN dan tahun berjalan. Selain itu, rewiu juga dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap program maupun kegiatan unit kerja pada tahun berjalan dengan memperhatikan perubahan strategis di lingkungannya sehingga pada akhirnya akan menemukan keselarasan.

1.2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya rewiu renstra Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020-2024 adalah:

1. melakukan evaluasi mengenai relevansi renstra Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020-2024 dengan arah kebijakan nasional, BKN, dan perkembangan situasi terkini; serta

2. memberikan rekomendasi/masukan perbaikan renstra Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020-2024.
- 1.3. Ruang Lingkup
 1. Reviu terhadap visi dan misi yang tercantum dalam renstra Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
 2. Reviu terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
 3. Reviu terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
 - 1.4. Landasan Hukum
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi

BKN mencanangkan visi "**mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**". Profesional artinya, (a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara efektif dan efisien sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara. Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu 1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

2.2. Misi

Perwujudan visi tersebut didukung oleh misi yang dicanangkan dengan mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada BKN. Penjabaran dari visi dilakukan dengan menetapkan misi untuk memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas ASN melalui;

1. pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. penyelenggaraan manajemen ASN;
3. penyimpanan informasi pegawai ASN;

4. **pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN; dan**
5. mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN.

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan menggunakan metode *balance scorecard* (BSC) dan berdasarkan reviu renstra tahun sebelumnya, sasaran strategis yang akan dicapai dilihat dari empat sudut pandang (perspektif):

1. Sasaran strategis dari perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*).

Sasaran strategis dari perspektif pemangku kepentingan adalah terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN.

2. Sasaran strategis dari perspektif pengguna layanan (*customer perspective*).

Sasaran strategis dari perspektif pengguna layanan adalah terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima.

3. Sasaran strategis dari prespektif internal/proses bisnis (*internal perspective/business process*).

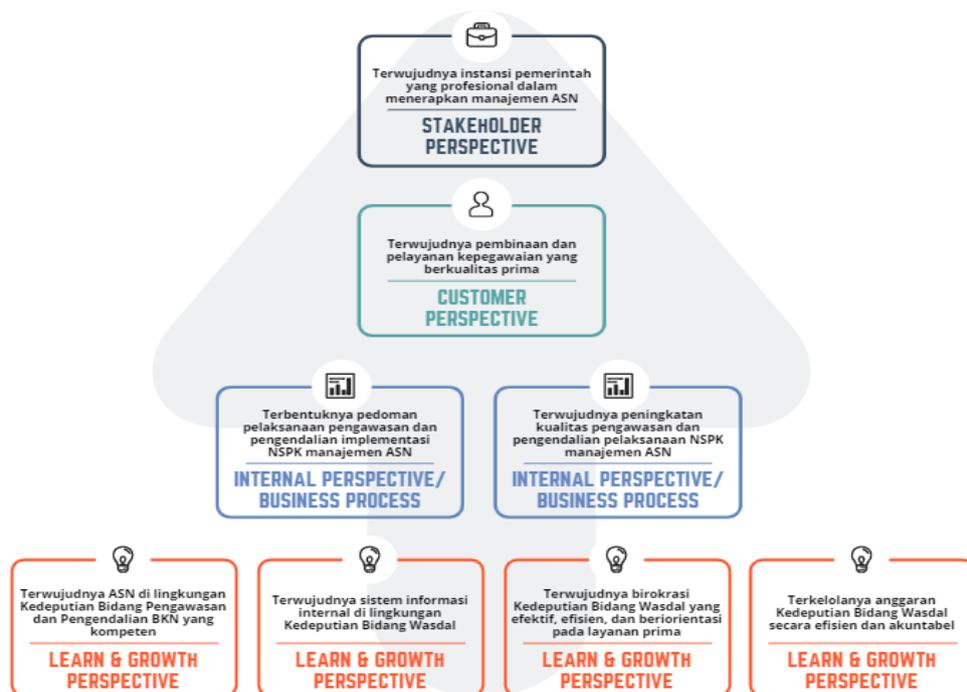
Sasaran strategis dari prespektif internal/proses bisnis adalah terbentuknya pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN dan terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN.

4. Sasaran strategis dari prespektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learn and growth perspective*).

Dari prespektif pembelajaran dan pertumbuhan, sasaran yang hendak diwujudkan dalam lima tahun yang akan datang adalah:

- a. terwujudnya ASN di lingkup Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN yang kompeten;

- b. terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. terwujudnya birokrasi Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
 - d. dan terkelolanya anggaran di lingkup Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian secara efisien dan akuntabel.
- Seluruh sasaran strategis tersebut digambarkan dalam bentuk peta strategi berikut ini:



Gambar 1.
Peta Strategi Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian

2.4. Indikator dan Target Kinerja

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran kinerja yang digunakan dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal tersebut sebagai ukuran kinerjanya. Berdasarkan reviu renstra tahun 2022, target kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK	5%	20%	40%	60%	100%
Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	Indeks kepuasan masyarakat	85	86	87	88	95
Terbentuknya pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN	Jumlah regulasi teknis dibidang pengawasan dan pengendalian yang dibentuk/diperbaharui	2 Draft	4 Draft			
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN	Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti	30%	65%	89%	95%	100%
Terwujudnya ASN Kedeputan Bidang Wasdal yang kompeten	Indeks profesionalitas ASN di lingkup Kedeputan Bidang Wasdal BKN	77	78	80	88	96,8
Terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Kedeputan Bidang Wasdal	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya birokrasi Kedeputan Bidang Wasdal yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	30	33	34	35	36
	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	70	75	79	81	85
Terkelolanya anggaran Kedeputan Bidang Wasdal secara efisien dan akuntabel	Persentase realisasi anggaran	85%	89%	90%	99%	100%
	Persentase tindaklanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%

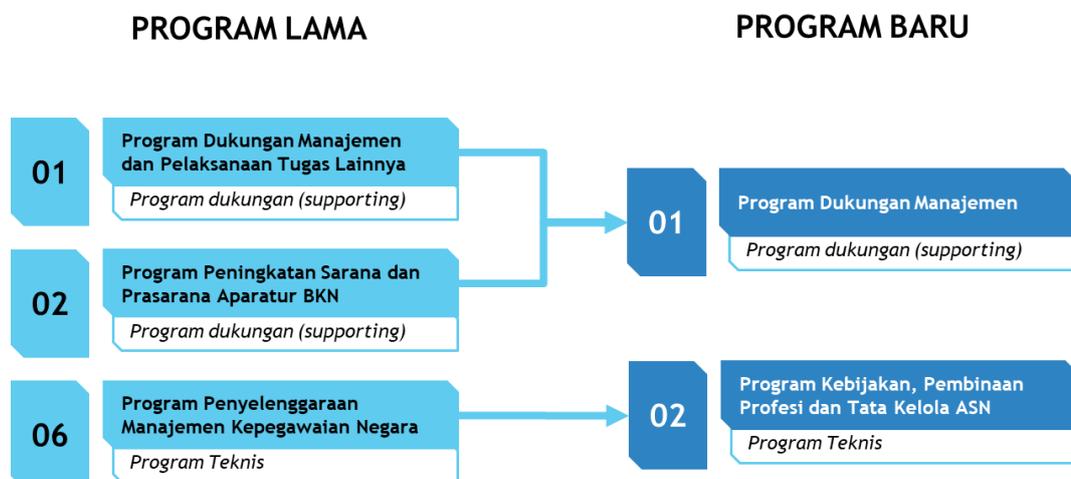
Tabel 1.
Target Kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020-2024

2.5. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, sesuai Surat Edaran Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan No. S-122 /MK.2/2020, B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tgl 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), perumusan program tidak lagi didasarkan pada tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga. Maka program terbagi menjadi 2 jenis, yaitu program generik dan teknis. Hal ini bertujuan untuk:

1. Melihat keterkaitan/keselarasan antara visi, misi, dan fokus pembangunan tujuh agenda pembangunan dan tugas fungsi K/L dan daerah secara makro;
2. dengan *redesign* sistem penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas;
3. rumusan nomenklatur baik untuk program/*outcome*/kegiatan/*output* mencerminkan “real work (eye catching)”; dan
4. *redesign* sistem penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja.

Setelah dilakukan redesign sistem perencanaan dan penganggaran, program teknis BKN adalah **Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN**. Sedangkan program generik BKN adalah **Program Dukungan Manajemen**. Berikut skema RSPP BKN.



Gambar 3.
Skema RSPP BKN

Adapun diantara kedua program tersebut, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian akan diselenggarakan melalui Program Teknis BKN yaitu Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN. Sesuai dengan strategi revitalisasi tata kelola dan reformasi birokrasi yang dicanangkan pada renstra tahun 2020-2024, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah merestrukturisasi organisasi yang semula beban kerja terdistribusi berdasarkan unsur dalam manajemen ASN menjadi berdasarkan wilayah kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan BKN No. 29 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKN. Kegiatan yang akan dilaksanakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada tahun 2021 yakni Pengawasan dan Pengendalian NSPK manajemen ASN terbagi ke dalam Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output (RO) sebagai berikut:

1. KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
 - a. RO Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I
 - b. RO Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II
 - c. RO Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III
 - d. RO Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah IV
2. KRO Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
 - a. RO Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah I
 - b. RO Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah II
 - c. RO Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah III
 - d. RO Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah IV

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

3.1. Monitoring Target Jangka Menengah

Pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2022 berjalan cukup menantang. Pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 membuat BKN khususnya Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian harus beradaptasi di tengah situasi krisis. Mulai dari *refocussing* anggaran sampai penyesuaian sistem kerja dilakukan agar dapat terus memberikan kinerja terbaiknya di masa pandemi seperti yang masih terjadi sekarang ini.

Pengelolaan manajemen internal yang dimotori oleh Sub Bagian Tata Usaha pada masing-masing direktorat di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah berupaya untuk mewujudkan komitmennya dalam melaksanakan pengembangan organisasi baik dari sisi SDM maupun kapabilitas organisasi. Pengembangan kompetensi secara konsisten dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas ASN dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) baik internal maupun eksternal. Adapun sampai tahun 2022, diklat yang telah dilaksanakan diantaranya adalah *in house training* mengenai *Digital Filing System, Data Visualization, Public Speaking*, diklat investigasi, dll. Selain itu dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi, Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga terus meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai evaluasi AKIP Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang meningkat 3,29 poin pada tahun 2022 menjadi 77,85. Di sisi pengelolaan anggaran, tingkat realisasi anggaran juga meningkat dari 97% menjadi 99,66%. Di samping itu, Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga senantiasa melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Apabila ditemukan temuan baik yang sifatnya administrasi maupun anggaran, Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian senantiasa menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat ataupun BPK. Namun demikian, hasil penilaian reformasi birokrasi menunjukkan nilai mandiri pelaksanaan reformasi di Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian mengalami penurunan menjadi 33,71 dari yang semula 34,12. Hal ini disebabkan karena perubahan dinamika kebijakan terkait reformasi birokrasi nasional.

Penguatan pengelolaan manajemen internal idealnya akan membuat proses bisnis berjalan lebih optimal. Pada aspek proses bisnis ini, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian melaksanakan dua kegiatan utamanya, yaitu menangani pengaduan permasalahan kepegawaian ASN dan melaksanakan audit kepegawaian baik secara reguler maupun investigatif. Berdasarkan data yang dimiliki, tingkat tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian terhadap temuan/pelanggaran implementasi NSPK manajemen ASN pada tahun 2022 meningkat 3% dari 89% pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian masalah kepegawaian dan kualitas rekomendasi hasil wasdal mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Hasil tersebut tentu menjadi modal penting untuk terus mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen ASN secara lebih profesional sesuai peraturan perundang-undangan. Di samping itu, secara simultan sepanjang tahun 2022 sejumlah draft regulasi teknis pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilakukan harmonisasi dan telah diundangkan. Diantara sejumlah draft tersebut yang telah diundangkan ialah draft Peraturan Presiden tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dan Peraturan BKN tentang Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 dengan judul yang sama dan Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Seluruh indikasi peningkatan kinerja yang telah disebutkan di atas berimbas pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan meningkatnya tingkat kepatuhan instansi pemerintah terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN. Secara periodik, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian melakukan survey kepuasan pada instansi pemerintah. Dari hasil survey tersebut, diketahui bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan dalam hal ini instansi pemerintah meningkat 1,98 poin menjadi 88,02 pada tahun 2022. Sedangkan instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN dengan baik meningkat menjadi 310 Instansi dari 53 instansi.

Pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BKN yang tertuang dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 1.8/KEP/2020 mengklasifikasikan warna capaian kinerja berdasarkan persentase capaiannya. Pengklasifikasian warna beserta kategorinya dibagi menjadi 4 sebagaimana terinci pada tabel berikut:

No.	Warna		Persentase Capaian Kinerja
1	HIJAU		BAIK (skor \geq 100)
2	KUNING		HATI-HATI ($80 \leq$ Skor $<$ 100)
3	MERAH		BURUK (Skor $<$ 80)
4	PUTIH		BELUM ADA SKOR

Mengacu pada klasifikasi warna capaian kinerja tersebut, pada tahun 2020 terdapat 8 indikator kinerja yang capaiannya berwarna hijau atau dalam kategori BAIK dan 3 indikator berwarna kuning atau berkategori HATI-HATI. Total nilai kinerja atau nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) tahun 2020 adalah 105,79 sebagaimana terinci pada tabel berikut.

NPSS/Nilai Kinerja 2020 : 105.79

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Target 2021	Realisasi 2021	Pencapaian (%)	Nilai	Status	NSS (%)	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholder Perspective									120.00	30.00	
SS.1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN							120.00				
IKU 1.	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK	5%	8%	120.00	120.00			BAIK			
Customer Perspective									98.11	24.53	
SS.2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima							98.11				
IKU 2.	Indeks kepuasan masyarakat	85	83.39	98.11	98.11			HATI-HATI			
Internal Process Perspective									106.00	26.50	
SS.3. Terbentuknya pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN							100.00				
IKU 3.	Jumlah draft regulasi teknis dibidang pengawasan dan pengendalian yang dibentuk/diperbaharui	2	2	100.00	100.00			BAIK			
SS.4. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN							112.00				
IKU 4.	Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN	100%	100%	100.00	40.00			BAIK			
IKU 5.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti	30%	60%	120.00	72.00			BAIK			
Learn and Growth Perspective									99.05	24.76	

SS.5. Terwujudnya ASN di lingkup Kedeputan Bidang WASDAL BKN yang kompeten							97.53				
IKU 6.	Indeks profesionalitas ASN di lingkup Kedeputan Bidang Wasdal	77.00	75.10	97.53	97.53			HATI-HATI			
SS.6. Terwujudnya sistem informasi ASN di lingkup Kedeputan Bidang Wasdal							95.10				
IKU 7.	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%	95.10%	95.10	95.10			HATI-HATI			
SS.7. Terwujudnya birokrasi di lingkup Kedeputan Bidang WASDAL BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima							101.29				
IKU 8.	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	32.00	32.74	102.31	51.16			BAIK			
IKU 9.	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	70.00	70.19	100.27	50.14			BAIK			
SS.8. Terkelolanya anggaran di lingkup Kedeputan Bidang WASDAL BKN secara efisien dan akuntabel							102.28				
IKU 10.	Persentase realisasi anggaran	85%	90%	105.69	42.28			BAIK			
IKU 11.	Persentase tindaklanjut hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat	100%	100%	100.00	60.00			BAIK			

Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 10 indikator kinerja yang capaiannya BAIK dan 1 berkategori HATI-HATI. Capaian kinerja yang berwarna kuning pada tahun 2021 jumlahnya telah berkurang. Sehingga, nilai kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 106,9.

NPSS/Nilai Kinerja 2021 : 106.90

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Target 2021	Realisasi 2021	Pencapaian (%)	Nilai	Status	NSS (%)	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholder Perspective									120.00	30.00	
SS.1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN							120.00				
IKU 1.	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK	20%	33%	120.00	120.00			BAIK			
Customer Perspective									100.05	25.01	
SS.2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima							100.05				
IKU 2.	Indeks kepuasan masyarakat	86.00	86.04	100.05	100.05			BAIK			
Internal Process Perspective									106.00	26.50	
SS.3. Terbentuknya pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN							100.00				
IKU 3.	Jumlah draft regulasi teknis dibidang pengawasan dan pengendalian yang dibentuk/diperbaharui	4	4	100.00	100.00			BAIK			
SS.4. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN							112.00				
IKU 4.	Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN	100%	100%	100.00	40.00			BAIK			
IKU 5.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti	65%	89%	120.00	72.00			BAIK			

Learn and Growth Perspective									101.54	25.39	
SS.5. Terwujudnya ASN di lingkup Kedepuitan Bidang WASDAL BKN yang kompeten								101.18			
IKU 6.	Indeks profesionalitas ASN di lingkup Kedepuitan Bidang Wasdal	78.00	78.92	101.18	101.18			BAIK			
SS.6. Terwujudnya sistem informasi ASN di lingkup Kedepuitan Bidang Wasdal								100.00			
IKU 7.	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%	100%	100.00	100.00			BAIK			
SS.7. Terwujudnya birokrasi di lingkup Kedepuitan Bidang WASDAL BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima								101.40			
IKU 8.	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	33.00	34.12	103.39	51.70			BAIK			
IKU 9.	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	75.00	74.56	99.41	49.71			HATI-HATI			
SS.8. Terkelolanya anggaran di lingkup Kedepuitan Bidang WASDAL BKN secara efisien dan akuntabel								103.60			
IKU 10.	Persentase realisasi anggaran	89%	97%	108.99	43.60			BAIK			
IKU 11.	Persentase tindaklanjut hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat	100%	100%	100.00	60.00			BAIK			

Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 10 indikator kinerja yang capaiannya BAIK dan 1 berkategori HATI-HATI. Capaian kinerja yang berwarna kuning pada tahun 2021 jumlahnya telah berkurang. Sehingga, nilai kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 106,9.

NPSS/Nilai Kinerja 2022 : 110.36

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama		Target 2021	Realisasi 2021	Pencapaian (%)	Status	NSS (%)	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholder Perspective								125.75	31.44	
SS.1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN						125.75				
IKU 1.	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK	20%	50%	127.75			BAIK			
Customer Perspective								101.17	25.29	
SS.2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima						101.17				
IKU 2.	Indeks kepuasan masyarakat	87.00	88.02	101.17			BAIK			
Internal Process Perspective								117.41	29.35	
SS.4. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN						117.41				
IKU 3.	Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN	100%	100%	100.00			BAIK			
IKU 4.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti	90%	92%	102.22			BAIK			
IKU 5.	Persentase PNS yang dilakukan profiling integritas dan moralitas	8%	12%	150.00			BAIK			
Learn and Growth Perspective								97.11	24.28	
SS.5. Terwujudnya ASN di lingkup Kedepatian Bidang WASDAL BKN yang kompeten						93.15				

IKU 6.	Indeks profesionalitas ASN di lingkup Kedepuitan Bidang Wasdal	80.00	74.52	93.15			HATI-HATI			
SS.6. Terwujudnya sistem informasi ASN di lingkup Kedepuitan Bidang Wasdal							97.00			
IKU 7.	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar	100%	97%	97.00			HATI-HATI			
SS.7. Terwujudnya birokrasi di lingkup Kedepuitan Bidang WASDAL BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima							97.43			
IKU 8.	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	35.00	33.71	96.31			HATI-HATI			
IKU 9.	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	79.00	77.85	98.54			HATI-HATI			
SS.8. Terkelolanya anggaran di lingkup Kedepuitan Bidang WASDAL BKN secara efisien dan akuntabel							100.85			
IKU 10.	Persentase realisasi anggaran	98%	99,66%	101.69			BAIK			
IKU 11.	Persentase tindaklanjut hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat	100%	100%	100.00			BAIK			

3.2. Evaluasi

Secara umum, terjadi peningkatan dalam pencapaian target-target kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian sejak tahun 2020. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya nilai pencapaian sasaran strategis dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Kendati demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan baik dari segi perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun pencapaian kinerja. Oleh karena itu, dalam tahun mendatang Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian perlu bekerja lebih optimal guna mencapai target kinerja yang diharapkan.

BAB III

REVIU RENCANA STRATEGIS

2.1. Reviu Visi

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagai unit eselon I BKN harus mendukung perwujudan visi BKN yang telah dicanangkan untuk lima tahun ke depan. Oleh karena itu, sejak ditetapkannya rencana strategis BKN tahun 2020-2024, visi Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian merupakan visi BKN yakni ***mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.*** Dalam keberjalanannya yang akan menginjak tahun ketiga periode renstra ini, visi tersebut tidak berubah karena masih relevan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden serta dinamika organisasi sampai saat ini.

2.2. Reviu Misi

Misi merupakan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk mendukung tercapainya visi. Misi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah misi ke-4 BKN, yakni ***pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN.*** Seperti visi, misipun tidak mengalami perubahan setelah dilakukan reviu karena masih relevan dengan dinamika organisasi sampai saat ini.

2.3. Reviu Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja

Visi dan misi perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja agar kinerja menjadi fokus dan terukur. Secara garis besar dan setelah ditinjau kembali, tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tidak diubah karena masih relevan dengan tujuan dan sasaran BKN serta perkembangan isu terkini. Akan tetapi sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian khususnya dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran NSPK manajemen ASN melalui

pemberian pertimbangan teknis
pengangkatan/pemindahan/pemberhentian/promosi/mutasi/
kepegawaian di instansi pemerintah. Deputi Bidang Pengawasan dan
Pengendalian hendak memastikan pemberian pertimbangan teknis
dilaksanakan secara tepat waktu sesuai prosedur, dan target tersebut
mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Adapun pada penetapan target
pada sejumlah indikator kinerja, dilakukan penyesuaian karena realisasi
kinerja telah melampaui target yang semula ditetapkan pada rencana
strategis.

Reviu target kinerja dilakukan pula pada seluruh indikator kinerja. Reviu target kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada renstra dengan realisasi kinerja tahun berjalan. Pada sejumlah IKU, terdapat realisasi kinerja 2021 yang telah melampaui target 2022. Dengan demikian, perlu dilakukan adendum terhadap target kinerja tahun 2022 s.d. 2024 pada sejumlah IKU. Berikut rincian adendum target kinerja tahun 2022-2024.

SEMULA				MENJADI				KET
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Adendum		
		2023	2024			2023	2024	
Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK	60%	100%	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal A dan B)	60%	100%	Perubahan redaksi IKU, menyesuaikan dengan IKU Kepala BKN
Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	Indeks kepuasan masyarakat	88	95	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	Indeks kepuasan masyarakat	89	95	Revisi target 2023 karena realisasi 2022 telah melampaui target renstra tahun 2023.
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN	-	-	-	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN	Persentase pertimbangan teknis pengangkatan/pemindahan/pemberhentian/promosi/mutasi kepegawaian instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK	100%	100%	Indikator kinerja tambahan dalam rangka memastikan pemberian pertimbangan teknis dilakukan secara taat prosedur

SEMULA				MENJADI				KET
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Adendum		
		2023	2024			2023	2024	
					yang diselesaikan tepat waktu			
Terkelolanya anggaran Kedeputian Bidang Wasdal secara efisien dan akuntabel	Persentase realisasi anggaran	98,5%	100%	Terkelolanya anggaran Kedeputian Bidang Wasdal secara efisien dan akuntabel	Persentase realisasi anggaran	100%	100%	Realisasi kinerja 2022 melampaui target renstra

Tabel 2.
Matriks Reviu Sasaran Strategis, IKU, dan Target Kinerja

2.4. Program dan Kegiatan

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, Kedeputian Bidang Wasdal melaksanakan program dan kegiatan hasil redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) sesuai Surat Edaran Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan No. S-122 /MK.2/2020, B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tgl 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Wasdal melalui kegiatan;

1. KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
 - a. RO Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I
 - b. RO Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II
 - c. RO Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III
 - d. RO Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Wilayah IV
 2. KRO Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
 - a. RO Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah I
 - b. RO Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah II
 - c. RO Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah III
 - d. RO Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Wilayah IV
- masih relevan dalam mendukung target-target kinerja Kedeputian Bidang Wasdal sehingga tidak diubah.

BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Reviu renstra perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan reviu renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun, sehingga visi dan misi BKN dapat terealisasi.